

Responding to the Shifting Interest in Elementary Level Islamic Education with Religious Moderation

Budiono

STAI Ma'arif Magetan, Indonesia

budibochum@gmail.com

Abstract

The shift in the paradigm of society to send their children to public elementary schools is caused by the implementation of religious education which is considered lacking by the community. Meanwhile, the community really needs a larger portion of religious education for their children. Along with this need, MIN/SDI is present in the community by offering more and more balanced hours of religious education. This then gives more interest to the community to send their children to MIN/SDI. So that their need for a balanced education between general science and religion can be fulfilled with religious education institutions added religious moderation as a perspective in the millennial century.

Key Word: *paradigm, religious education, moderation.*

Abstrak

Pergeseran paradigma masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri disebabkan oleh penerapan pendidikan keagamaan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Sedangkan saat ini masyarakat sangat membutuhkan pendidikan keagamaan yang lebih banyak porsi nya bagi anak- anak mereka. Seiring kebutuhan tersebut hadir lah MIN/SDI ditengah masyarakat dengan tawaran jam pendidikan keagamaan yang lebih banyak dan seimbang. Hal ini kemudian yang memberikan minat lebih bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada MIN/SDI. Sehingga kebutuhan mereka akan pendidikan yang seimbang antara ilmu umum dan agama dapat terpenuhi dengan lembaga pendidikan keagamaan ditambahkan moderasi beragama sebagai cara pandang di abad milenial.

Kata Kunci: *paradigma, pendidikan keagamaan, moderasi.*

Correspondence authors:

Budiono, budibochum@gmail.com

How to Cite this Article

Budiono, B. (2023). Responding to the Shifting Interest in Elementary Level Islamic Education with Religious Moderation. *Jurnal Paradigma*, 15(1), 94-104. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i01.12>



PENDAHULUAN

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional, arah pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan kompetensi pada diri siswa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003). Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU RI nomor 20 tahun 2003).

Pendidikan merupakan salah satu bidang strategis yang turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Hal ini didukung bahwa pendidikan merupakan salah satu dari tiga indikator penentu kemajuan bangsa yang terangkum dalam indek pembangaunan manusia (BPS RI, 2016). Pendidikan menjadi pilar penting dalam mengembangkan diri manusia untuk menguasai bidang-bidang yang lain. Sebagai contoh di Jepang, Negara yang pernah porak poranda dan tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai namun saat ini bisa menguasai dunia karena mereka memahami bahwa masa depan sangat ditentukan oleh pendidikan dan pembangunan manusianya (Neamtu, 2014). Juga kebijakan *European Council*, saat ini menerapkan sistem pendidikan yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era globalisasi dunia (Seiça & Sanches, 2013). Ada Juga Malaysia yang ingin menjadi Negara maju dan kompetitif berbasis riset, maka sistem pendidikannya dikembangkan dengan menekankan pada keberhasilan pembelajaran sains (Velloo, Perumal, & Vikneswary, 2013).

Secara umum pendidikan di Indonesia terbagi menjadi empat jenjang, yaitu pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan di Indonesia diatur oleh dua kementerian yaitu kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi juga kementerian agama yang mencakup pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi (Perpres no 14 tahun 2015). Pendidikan dasar yang diselenggarakan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dengan sekolah dasar (SD) Negeri dan pendidikan dasar yang diselenggarakan kementerian agama dengan madrasah ibtidaiyah (MI).

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran paradigma pendidikan dimasyarakat, utamanya menyangkut pendidikan Islam di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan minat masyarakat yang lebih memilih pendidikan dasar bagi anak-anaknya pada Madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Islam dari pada di sekolah dasar (SD) negeri. Dampaknya adalah

menurunnya jumlah siswa di sekolah dasar (SD) Negeri, bahkan banyak sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan siswa hingga masuk dalam kategori sekolah yang tidak ideal sehingga harus dimerger untuk *efisiensi* (Permendikbud nomor 6 tahun 2021). Kondisi ini berbanding terbalik dengan madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) atau sekolah dasar Islam yang mengalami surplus dalam penerimaan jumlah siswa baru bahkan banyak sekolah yang mengalami *overload*. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu, tapi jamak terjadi di semua daerah. (siagapendis.2021)

PAI dalam lingkup persekolahan dapat kita bagi ke dalam tiga aspek yakni landasan yuridis, religius, dan psikologis. Berkenaan dengan landasan yuridis yaitu mengacu pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003a, pasal 3 termaktub bahwasannya pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian dalam pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwasannya setiap pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, kewarganegaraan, dan Bahasa. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 dijelaskan pula mengenai peraturan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Kementerian Hukum, 2015). Landasan Religius menurut Firmansyah (2019), Landasan religius dalam hal ini yang menjadi sumber pedoman dalam pelaksanaan PAI di sekolah yakni Alquran dan hadits. Salah satu ayat yang sering kali dikaitkan dengan landasan adanya PAI ialah Q- S. AnNahl: 125 yang mana kita diperintahkan oleh Allah swt untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah yang baik. Kemudian dalam hadits riwayat bukhari pun dikatakan bahwasannya kita diperintahkan untuk berdakwah walaupun hanya dengan satu ayat. Adapun landasan psikologis sosial menurut Firmansyah (2019) pada intinya manusia membutuhkan pedoman dan sandaran dalam hidupnya yakni berupa agama agar hati dan pikirannya menjadi tenang seperti dalam QS.-RAar d: 28 ayat menegaskan bahwasannya orang yang senantiasa mengingat Allah maka hatinya akan menjadi tenteram. Beberapa aspek tersebut menjadi landasan diadakannya PAI di persekolahan.

Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi keanekaragaman alam, budaya, ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultural dengan segala kekayaan dan perbedaan yang ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia sejumlah, 230 juta

jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 238,09 juta jiwa (86,93%) beragama Islam, 20,45% juta jiwa (7,47%) beragama Kristen, 8,43 juta jiwa (3,08%) beragama Katolik, 4,67 juta (1,71%) beragama Hindu, 0,3 juta jiwa atau 0,74% juta jiwa penduduk di tanah air yang beragama Buddha, terdapat 73,63 ribu jiwa (0,03%) memeluk agama Konghucu, serta terdapat 126,51 ribu (0,05%) yang menganut aliran kepercayaan. (Kusnandar, 2022). Sebagai agama mayoritas, Islam harus menunjukkan Rahmatan lil alamin. Moderasi beragama dalam Islam diperlukan agar dapat menjaga kerukunan antar umat yang ada. Makna moderasi dalam Islam adalah wasathiyah yakni Islam yang menjadi jalan tengah dan cinta kedamaian dan menerima setiap pembaruan demi kemashalahatan bersama. Prinsip moderat dalam Islam yakni tawassuth (mengambil jalan tengah), tawazun (berkesinambungan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (persamaan), syura (musyawarah), islah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang utama), tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), serta yang terakhir adalah taahhadhur (berkeadaban) (Hasan, 2021).

Dewasa ini, tindak radikalisme dapat terjadi dimana saja tak terkecuali dalam lingkup pendidikan. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait radikalisme pada tahun 2018 dalam lingkup sekolah SD dan SMP, ada sebanyak 57,03% guru yang memiliki pandangan intoleran di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan data yang dirilis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang menyebutkan bahwa 48,9% siswa mendukung adanya tindakan radikal. (FDK, 2019) Sebagai contoh kasus radikalisme yang terjadi dalam lingkup sekolah dasar yakni terjadinya intoleransi dari guru pengajar pramuka di salah satu SD yang berada di Yogyakarta dengan mengajarkan yel yel tepukan rasis yang menggunakan kata kafir pada tahun 2020 silam (Ismail, 2021).

Dari kasus yang beredar di lingkup pendidikan, maka sangat penting upaya untuk menelaah proporsi atau sebaran kurikulum PAI dimulai dari pendidikan tingkat dasar karena anak pada usia ini -6-12 tahun mulai dapat bernalar dan berpikir secara konkret (Rahmi & Hijriati, 2021). Pendidikan Agama Islam atau yang disebut dengan PAI seharusnya bisa menjadi solusi untuk permasalahan radikalisme di lingkup sekolah karena tujuan PAI ialah untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi yang memiliki keyakinan, ketaatan, dan akhlak mulia untuk individunya sendiri dan berdampak pada masyarakat luas. (Firmansyah, 2019)

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai moderasi beragama dan menjadi dasar laporan artikel ini yakni dilakukan oleh Abidin (2021) yang berjudul tentang nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan terkait

hasil dari analisis Kompetensi Dasar PAI SD kelas-Vs I dalam Permendikbud no 37 tahun 2018. Namun pada penelitian tersebut belum dijelaskan mengenai hakikat PAI di persekolahan dan bagaimana moderasi beragama menjadi salah satu tujuan PAI pada tingkat SD. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana hakikat PAI di persekolahan, proporsi materi PAI, dan bagaimana moderasi beragama menjadi salah satu tujuan PAI pada tingkat SD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan permasalahan

Fenomena tersebut menunjukkan pergeseran paradigma pendidikan agama Islam khususnya ditingkat pendidikan dasar yang berimplikasi pada minat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di MIN /SDI daripada di SD Negeri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa masyarakat lebih berminat pada MIN dan SDI serta meninggalkan SD Negeri? Apakah ada hal yang kurang pada system pendidikan dan pembelajaran di SD Negeri? Ataupun ada keunggulan dan kompetensi lebih yang dimiliki oleh MIN dan SDI yang memberikan pembeda.

B. Kelogisan (*Rationale*)

Pendidikan agama adalah salah satu alasan utama dari fenomena pergeseran paradigma pendidikan dasar, hal ini sebagaimana diungkapkan Danah Zohar dan Ian Marshall (*Spiritual Quotient*,2007) bahwa manusia di era milenium akan semakin mendekati pada nilai religiusitas. Ini yang sekaligus menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan pendidikan untuk lebih mengelola pendidikan dengan memasukkan nilai agama dalam muatan kurikulumnya.

C. Metode dan Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan trianggulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2015). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswel, 2014).

Adapun jenis dari penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih dalam suatu peristiwa (kasus) menggunakan berbagai macam sumber data (Baxter & Jack, 2008). Studi Kasus juga memperbolehkan peneliti untuk menganalisis kasus tentang individu atau organisasi, intervensi, hubungan relasi, dan program (Yin, 2003).

Dalam studi kasus ini peneliti memiliki peranan vital dalam menafsirkan dan mengumpulkan data-data penelitian. Adapun data-data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di sample sekolah di beberapa daerah. Untuk membuktikan validitas data yang diperoleh, peneliti kemudian melakukan triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensintesis data dari berbagai sumber (Bachri, 2010:55). Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi metode dan triangulasi informan. Triangulasi metode dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Melalui teknik ini dilakukan penghimpunan dan pengumpulan data dari dokumen yang ada (Sukmadinata, 2015:221). Dalam hal ini adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sedangkan triangulasi informan dilakukan dengan cara mewawancarai informan diluar informan utama namun terlibat dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan untuk melakukan interpretasi dan penafsiran terhadap data-data penelitian yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengadopsi langkah yang dikembangkan oleh Miles, Hubberman & Saldana (2014), yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data, dan (1) Penarikan Kesimpulan. Lebih lanjut, dalam reduksi data dilakukan seleksi dan pemilahan data-data. Data dipilah mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Kemudian data yang telah dipilah dirangkai sedemikian rupa sehingga mudah digeneralisasi dan diverivikasi. Akhirnya data yang telah dirangkai digeneralisasi dan diverivikasi untuk menarik suatu kesimpulan.

D. Signifikansi

- Bagi pemangku kebijakan

Madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) dan SDI menerapkan program pendidikan dengan memperhatikan keseimbangan anatara ilmu umum dan ilmu agama. Bahkan kecenderungannya beberapa SDI menerapkan program pendidikan *full day* yang mana tambahan jam dilakukan untuk memperkuat ilmu keagamaan. *Full day school* sendiri merupakan satu istilah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, aktifitas anak lebih banyak dilakukan di sekolah dari pada di rumah (Setiyarini, Joyoatmojo & Sunardi, 2014). Ini bisa menjadi bahan evaluasi kurikulum bagi pihak terkait untuk perbaikan di sekolah dasar (SD).

Pendidikan karakter di MIN dan SDI terasa lebih efektif karena karakter yang terbentuk disesuaikan dengan norma-norma keagamaan yang dewasa ini mulai ditinggalkan. Bila merujuk kepada ciri kehidupan manusia pada era 2000 (era globalisasi) ini ditandai dengan kehidupan yang serba keras, kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan (kompetitif) yang ketat disegala lini kehidupan, perpacuan kehidupan kebendaan (materi) yang berorientasi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kehidupan menjadi bersifat individualisme dengan melemahnya kepedulian sosial, terjadinya dekadensi moral (kemerosotan akhlak) dan masalah-masalah penyakit hati manusia lainnya (Nasution, 2013). Kemudian lebih jauh lagi dapat kita amati, dewasa ini para pemuda dan pemudi kita dalam berperilaku lebih banyak meniru-niru yang datang dari Barat, seakan-akan yang mereka lihat dan tonton dari Barat itu patut dicontoh dan diikuti agar jangan ketinggalan zaman (Ansori, 1992). Sehubungan dengan problema tersebutlah maka pendidikan Islam mendapat prioritas utama untuk dibina dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal (Nasution, 2013).

Moderasi beragama sebagai tujuan pembelajaran PAI di tingkat Sekolah Dasar

Problematika bangsa yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan dengan moderasi beragama. (Yanti & Witro, 2020) Moderasi beragama melalui pengembangan kurikulum PAI bertujuan dalam rangka untuk menginternalisasikan gerakan Islam moderat kalangan peserta didik yang dapat mengajarkan toleransi di kelompok peserta didik yang berbeda, menebarkan perdamaian, mengedepankan berdialog, dan menolak ujaran kebencian atau hoax yang beredar baik di dalam maupun di luar sekolah. Moderasi beragama dapat mengajarkan dan mengamalkan pembiasaan berakhlak mulia. (Suprpto, 2020). Indonesia termasuk ke dalam negara demokrasi maka pemerintah Indonesia berperan sebagai penentu kebijakan terkait pendidikan agama termasuk Islamic Religious Education (IRE). Tiga bentuk IRE di Indonesia yakni, 1) pendidikan agama yang diselenggarakan oleh pondok pesantren atau yang diselenggarakan oleh komunitas muslim.

2) Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh sekolah Islam, dan pendidikan agama yang merupakan sebuah mata pelajaran agama di sekolah. (Anwar, 2016). Menurut Fuad dalam (Selvia et al., 2018) dewasa ini Islam yang moderat telah tergerus dengan oknum tidak bertanggung jawab, yang menampakan dirinya seolah seorang muslim tapi perbuatannya justru merusak citra Islam. Seperti merasa paling benar, mudah mengkafirkan orang lain, dan tidak mencerminkan akhlak nabi. Tujuan PAI di sekolah menurut Aziz et al (2020) ialah untuk menanamkan dan menumbuhkan internalisasi Islam agar tercipta manusia yang beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Moderasi beragama harus diajarkan dan dikuatkan sejak dini

karena agar ketika siswa beranjak pada sekolah tingkat menengah, maka pemahaman mereka dapat berkembang dan berpikir kritis terhadap hal-hal yang akan dihadapinya (Ramadhan, 2021). Oleh sebab itu PAI pada tingkat sekolah dasar memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga keutuhan dan kerukunan NKRI sejak dini, hal tersebut dapat diimplementasikan dalam nilai-nilai moderasi agama yang terdapat di kurikulum PAI. Salah satu nilai moderasi yakni toleransi beragama. (Chadidjah et al., n.d.) Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk seluruh manusia dalam menciptakan kehidupan yang tentram terlebih Indonesia dengan kemajemukannya yang mana jika toleransi tidak diterapkan sejak dini dapat memicu berbagai konflik yang akan dihadapi (Sahal et al., 2018) Toleransi beragama dapat mencegah kasus yang marak terjadi dan juga mengantisipasi peristiwa yang tidak di inginkan. Nilai toleransi yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah yakni sikap menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak adanya konflik di antara berbagai perbedaan, mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah dengan secara damai dan tidak menimbulkan kerusakan, tidak langsung men-judge perbedaan orang lain, mudah memaafkan, tidak mudah dalam memprovokasi atau terprovokasi. (Dianita et al., 2019) Proses internalisasi nilai toleransi dirancang melalui enam tahapan yaitu tahap pemberian informasi pelatihan, pemodelan, pengkondisian, pembiasaan, dan pembudayaan (S. Anwar, 2018). Menurut Anwar (2016) agar toleransi dapat terbangun dengan baik yakni dapat memberdayakan tiga lingkungan sosial yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang mana nantinya siswa harapannya dapat memperkaya pengalaman belajar, membiasakan, dan mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Terjadinya pergeseran paradigma masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri disebabkan oleh penerapan pendidikan keagamaan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Sedangkan saat ini masyarakat sangat membutuhkan pendidikan keagamaan yang lebih banyak porsinya bagi anak-anak mereka. Seiring kebutuhan tersebut hadir lah MIN/SDI di tengah masyarakat dengan tawaran jam pendidikan keagamaan yang lebih banyak dan seimbang. Hal ini kemudian yang memberikan minat lebih bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada MIN/SDI. Sehingga kebutuhan mereka akan pendidikan yang seimbang antara ilmu umum dan agama dapat terpenuhi tanpa harus repot mencari lembaga pendidikan keagamaan diluar lembaga pendidikan umum (SDN).

Moderasi beragama dalam muatan kurikulum sangat dibutuhkan. Utamanya pada jenjang

sekolah dasar dimana siswa harus mulai dikenalkan terkait moderasi beragama sedini mungkin agar nantinya pada jenjang selanjutnya siswa sudah mulai mampu berpikir kritis terhadap suatu hal. Tujuan PAI di persekolahan ialah untuk mewujudkan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Dari 5 ruang lingkup materi pembelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran PAI kelas I sampai VI terdapat sebaran sebagai berikut; Alquran, 11 KD; Aqidah, 17 KD; Akhlak 25 KD, Fiqih, 12 KD; dan Sejarah Peradaban Islam (SPI) yaitu 33 KD. Kompetensi Dasar (KD) PAI baik dari kelas I hingga VI dianalisis mengenai-nilai moderasi beragama, yang difokuskan pada-K3I(pengetahuan), setelah dianalisis ternyata kurang dari separuh dari jumlah keseluruhan KD, yakni hanya mencapai 46 KD saja, 69(44%) dengan sebaran persentase di kelas I dan IV yakni 47,06%; kelas II (53,33%); kelas III (50%); kelas IV (33,33%); kelas VI 57,14%. Dari data tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan agar menambah porsi moderasi beragama pada tiap-tiap level kelas. PAI pada tingkat sekolah dasar memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga keutuhan dan kerukunan NKRI sejak dini, yakni dengan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi agama dalam kurikulum PAI. Salah satu nilai moderasi yakni toleransi beragama. Toleransi beragama dapat mencegah kasus yang marak terjadi dewasa ini dan juga mengantisipasi perpecahan dan propaganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Khairil. 1992. *Sebuah Alternatif Menghadapi Arus Globalisasi*
- Bachri. B.S. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1): 46-62.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Index Pembangunan Manusia. (Online), (<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26>), diakses 15 Februari 2015.
- Baxter, Pamela. & Jack, Susan. 2008. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*. (Online), 13(4): 544-559. (<http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>), diakses 16 Juli 2017.
- Burchinal, M. R. & Peisner-Feinberg, E. (2002). Development of Academic Skills from Preschool Through Second Grade: Family and Classroom Predictors of Developmental Trajectories. *Journal School Psychology*, 40(5), 415 – 436.
- Carvalho, Carolina., Martins, Dulce., Santana, Lidia E. Feliciano, Luis. 2014. Teacher Feedback: Educational Guidance in Different School Contexts. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, (Online) 159: 219 – 223. (<http://www.sciencedirect.com>), diakses 10 Februari 2017.
- Creswell. John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dapodik. 2021. *Data Pokok Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 Jenjang SD*. (Online), (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>)
- Fitriani, Laily. 2015. Pendidikan *Peace Building* di Pesantren: Sebuah Upaya Mencegah Radikalisasi. *Ulul Albab*. 16(1): 117-130.
- Lawson, D. R. (2010). An assessment of Arabic transliteration systems. *Technical Services Quarterly*, 27 (2), 164-177.